

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 14, Juli 2025

Stimulus Ekonomi dan Penguatan Foreign Direct Investment

p.3

Tantangan Pengembangan Koperasi Merah Putih

p.8

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



9 772502 868006

ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H.,
M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA,
PQIA

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Stimulus Ekonomi dan Penguatan Foreign Direct Investment

p.3

Dalam perspektif jangka pendek, stimulus ekonomi dapat menjadi jalan mempertahankan kondisi ekonomi agar tidak memburuk. Namun, sering kali stimulus jangka pendek tidak memberikan dampak yang optimal akibat adanya persoalan yang lebih fundamental yang harus menjadi perhatian. Stimulus pada masa lebaran dapat dijadikan cerminan belum optimalnya dampak dari stimulus ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembenahan jangka panjang guna memperkuat fundamental ekonomi nasional perlu dilakukan. Optimalisasi Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu cara yang dapat di tempuh Pemerintah, dengan menyelesaikan beberapa hal yang menjadi penghambat. Guna mengoptimalisasi FDI dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah memetakan industri prioritas yang memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, mengarahkan kebijakan dan stimulus pada industri prioritas tersebut, serta mengambil langkah cepat dan tepat guna memperbaiki kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia.

Tantangan Pengembangan Koperasi Merah Putih

p.8

Program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagaimana termaktub dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 merupakan inisiatif strategis Pemerintah Indonesia untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Per Juli 2025, tahap awal dengan target 80.000 KMP sudah dapat direalisasikan. Namun, pencapaian tujuan akhir Inpres Nomor 9 Tahun 2025 masih sangat ditentukan oleh langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan yang berpotensi menghambat keberhasilan program KMP di masa mendatang, mulai dari kelembagaan hingga kolaborasi multi sektor. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah menyusun roadmap pengembangan KMP yang lebih terukur dan komprehensif. Roadmap tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (i) indikator keberhasilan yang lebih terukur; (ii) strategi pengembangan dan keberlanjutan program jangka panjang; dan (iii) strategi penguatan sense of belonging dan kolaborasi multi sektor.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 15**

***Tantangan Pengawasan terhadap
Penyalahgunaan Bantuan Sosial***

***Sekolah Rakyat sebagai Kebijakan
Pendidikan Afirmatif: Potensi dan
Tantangan***

Stimulus Ekonomi dan Penguatan Foreign Direct Investment

Iranisa*)

Abstrak

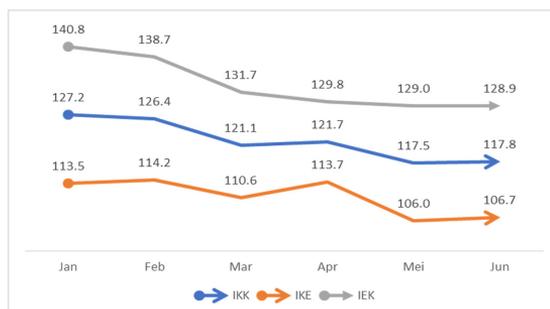
Dalam perspektif jangka pendek, stimulus ekonomi dapat menjadi jalan mempertahankan kondisi ekonomi agar tidak memburuk. Namun, sering kali stimulus jangka pendek tidak memberikan dampak yang optimal akibat adanya persoalan yang lebih fundamental yang harus menjadi perhatian. Stimulus pada masa lebaran dapat dijadikan cerminan belum optimalnya dampak dari stimulus ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pembenahan jangka panjang guna memperkuat fundamental ekonomi nasional perlu dilakukan. Optimalisasi Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu cara yang dapat di tempuh Pemerintah, dengan menyelesaikan beberapa hal yang menjadi penghambat. Guna mengoptimalkan FDI dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah memetakan industri prioritas yang memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, mengarahkan kebijakan dan stimulus pada industri prioritas tersebut, serta mengambil langkah cepat dan tepat guna memperbaiki kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia.

Pada Juni 2025, Pemerintah mengeluarkan 5 paket stimulus ekonomi dengan total alokasi sebesar Rp24,44 Triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp23,59 Triliun dan Non APBN sebesar Rp0,85 Triliun yang diluncurkan selama periode Juni-Juli 2025. Kelima paket tersebut yaitu, (1) Diskon Transportasi sebesar Rp0,94 Triliun selama libur sekolah dasar hingga menengah pada bulan Juni-Juli 2025; (2) Diskon Tarif Tol sebesar Rp0,65 Triliun; (3) Penebalan Bantuan Sosial Rp11,93 Triliun untuk Bulan Juni-Juli 2025 disalurkan satu kali di bulan Juni 2025; (4) Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp10,72 Triliun untuk 2 bulan (Juni-Juli 2025) yang disalurkan pada bulan Juni 2025; dan (5) Perpanjangan Diskon Iuran JKK Rp0,2 Triliun bagi Pekerja Sektor Padat Karya. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal I hanya mencapai 4,87 (y-on-y) dan terkontraksi 0,98 persen (q-to-q). Tidak hanya itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan stimulus pada Januari dan Februari 2025, yakni diskon listrik sebesar Rp6,98 triliun dan 6,64 triliun. Dengan demikian, Pemerintah telah mengucurkan dana sekitar kurang lebih Rp38.06 triliun sepanjang Semester I Tahun 2025 guna mendorong perekonomian.

*) Staf PPPK, Inspektorat I, Setjen DPR RI.

Apabila memperhatikan beberapa indikator, stimulus yang dikeluarkan Pemerintah memberikan hasil yang menggembirakan. Salah satunya yaitu pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berdasarkan hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia. Survei konsumen merupakan survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen terkait kondisi ekonomi saat ini yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan. Rilis terbaru, menunjukkan tren penurunan pada IKK dan IEK sepanjang Januari hingga Juni 2025 (Gambar 1).

Gambar 1. IKK dan IEK Periode Januari-Juni 2025



Sumber: Bank Indonesia, 2025

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen)

PDB	2022				2023				2024				2025
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0.19	2.42	-0.3	2.14	0.23	3.09	-0.46	1.58	0.64	3.12	-0.48	1.64	0.55
Pengeluaran Konsumsi LNPR	-1.41	6.15	0.55	5.66	-0.87	8.63	-1.65	11.77	3.95	-3.92	-0.15	6.36	1.02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49.9	32.2	10.81	29.97	-45.7	41.4	-3.61	39.18	-36.5	19.79	-1.17	38.58	-38.9
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-2.57	-3.64	6.53	3.31	-4.26	-1.25	7.58	2.57	-4.76	-0.65	8.35	2.44	-7.4
Ekspor Barang dan Jasa	-2.47	8.84	8.31	-0.03	-5.21	-5.33	7.12	5.76	-5.37	0.86	7.78	4.63	-6.11
PDB	-0.94	3.73	1.83	0.36	-0.9	3.86	1.6	0.45	-0.83	3.79	1.5	0.53	-0.98

Sumber: BPS, 2025

Tren tersebut merupakan cerminan risiko kelesuan ekonomi di masa mendatang, yang harus menjadi isyarat bagi Pemerintah untuk diperhatikan dan dimitigasi. Selain itu, perhatian dan langkah mitigasi tersebut juga dibutuhkan apabila melihat pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2025 terkontraksi 0,98 persen dibanding kuartal sebelumnya (BPS, 2025) dan proyeksi kuartal II yang hanya mencapai 4,7 persen (Hasiana, 2025).

Daya Ungkit Stimulus Masa Lebaran Harus Jadi Cerminan

Pada buku “Ekonomi Kita”, arus mudik dan stimulus Lebaran/Hari Raya Idul Fitri diperkirakan akan menopang perekonomian di kuartal II 2025, dengan perkiraan jumlah pemudik mencapai 146,48 juta orang yang akan mendorong perputaran uang mencapai Rp357 triliun. Namun, realitasnya momentum Lebaran belum mampu mendorong perekonomian. Hal tersebut terindikasi dari proyeksi pertumbuhan Kuartal II yang hanya 4,7 persen, menurun dari Kuartal I yang mencapai 4,87 persen. Hidayat (2025) menyatakan penurunan kontribusi Lebaran terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan daya beli yang belum pulih pasca PHK massal dan inflasi 2024, derasnya arus masuk produk impor terutama di sektor fesyen dan elektronik, serta efektivitas Tunjangan Hari Raya (THR) yang menurun.

Apabila bercermin pada kebijakan stimulus yang diambil Pemerintah di

masa lebaran dan proyeksi pertumbuhan Kuartal II-2025 yang hanya 4,7 persen, terdapat pelajaran penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Selama periode Lebaran, Pemerintah telah memberikan beberapa stimulus, seperti (i) diskon harga tiket pesawat sebesar 13 persen sampai dengan 14 persen; (ii) diskon tarif tol selama 3-5 hari sebelum dan sesudah Lebaran; dan (iii) THR senilai lebih kurang Rp50 triliun untuk ASN dan memperkirakan lebih dari Rp120 triliun pada sektor swasta. Namun, stimulus tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap kinerja ekonomi Kuartal II. Hal tersebut mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada masa Lebaran. Hasil Jajak Pendapat “Kompas”, hanya 29,3 persen masyarakat menganggarkan biaya lebaran lebih besar di tahun 2024, bahkan pada masyarakat di ekonomi kelas bawah (lower class) sebanyak 31 persen responden menganggarkan biaya Lebaran lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Purwanti, 2025). Lebih lanjut, 30 persen di antaranya lebih mendahulukan untuk membayar utang dan sisanya menyimpan dana untuk kebutuhan darurat. Perubahan perilaku ini mengindikasikan ada sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan keuangan, dan sejalan dengan IKK yang mengalami tren menurun sejak awal tahun 2025.

Stimulus masa Lebaran dan perubahan perilaku masyarakat memberikan isyarat, terdapat permasalahan fundamental yang harus menjadi perhatian. Hidayat (2025)

menyatakan belum signifikannya dampak konsumsi Ramadhan 2025 terhadap perekonomian diakibatkan struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada belanja Pemerintah dan investasi serta kenaikan harga pangan dan energi yang membebankan belanja pokok rumah tangga. Efisiensi belanja berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025 turut mempengaruhi kinerja Kuartal II-2025, mengingat pengeluaran Pemerintah memiliki dampak yang relatif signifikan terhadap struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada Kuartal I-2025 terkontraksi hingga 38,9 persen (Tabel 1). Pengalaman stimulus masa Lebaran dapat menjadi cerminan bahwa perekonomian tidak boleh hanya disandarkan pada stimulus yang bersifat jangka pendek, namun harus disandarkan pada perbaikan fundamental dalam perspektif jangka panjang.

Investasi dapat Menjadi Aktor Kunci sebagai Penggerak Perekonomian

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menyebutkan investasi memegang peranan kunci dalam struktur pertumbuhan ekonomi. Menurut teori investasi Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady-state growth*) dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan investasi. Jika melihat *press release* BKPM pada 29 April 2025, kinerja investasi Kuartal I menunjukkan hasil positif yaitu sebesar Rp465,2 triliun atau naik 2,7 persen (*q-to-q*) dan mengalami peningkatan 15,9 persen (*y-on-y*). Kepala BKPM mengatakan investasi yang berasal dari *Foreign Direct Investment* (FDI) masih menunjukkan kontribusi yang signifikan di Kuartal I-2025, yaitu sebesar Rp230,4 triliun atau 49,5 persen dari total investasi. Nilai investasi yang masuk pada Kuartal I tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja secara langsung sebesar 594.104 orang atau 8,5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kuartal I-2024.

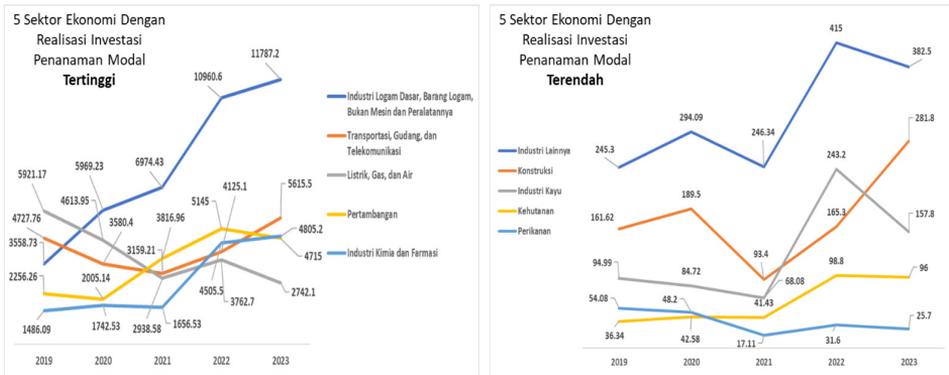
FDI merupakan elemen kunci dalam membangun perekonomian suatu negara. FDI tidak hanya sebatas masuknya modal ke suatu negara, tetapi juga membawa

teknologi, pengetahuan, lapangan pekerjaan baru, dan kesempatan yang besar untuk berkembang, terutama dalam hal inovasi. Allen (2024) menyebutkan bahwa FDI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. FDI memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila didukung dengan perbaikan infrastruktur dan kemajuan teknologi (Sugiyanto et al 2024). Pemerintah juga dapat mengarahkan kebijakan pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki dampak lebih besar dalam menstimulus perekonomian agar FDI lebih optimal dalam menggerakkan perekonomian (Fazaalloh, 2024).

Apabila dilihat dari sebaran menurut industri, realisasi FDI terbesar dicatatkan industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan lainnya, yakni sebesar US\$7.850,03 juta per tahun sepanjang periode 2019-2013 (Gambar 2). Bahkan kinerja tersebut tetap bertahan di Kuartal I tahun 2025, di mana kontribusinya masih yang terbesar sebagai penyumbang FDI. Oleh karena itu, Pemerintah dapat lebih berfokus pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan lainnya. Fokus tersebut idealnya diimbangi dengan ketersediaan dan kesiapan kapasitas sumber daya yang memadai, seperti kesiapan sumber daya manusia.

Mengoptimalkan kinerja perekonomian melalui optimalisasi FDI pada jenis industri yang berkinerja tinggi dan memberikan efek ganda besar perlu terus dilakukan Pemerintah. Allen (2024) menyebutkan FDI akan optimal menggerakkan perekonomian jika stabilitas makro ekonomi terjaga dan dengan dukungan kebijakan Pemerintah yang sesuai. Tidak hanya itu, Alvian et al (2025) juga menyebutkan bahwa kepastian hukum dan simplifikasi regulasi harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Jika melihat dari laporan penilaian atas kemudahan berusaha B-Ready yang dirilis Bank Dunia pada Tahun 2024, pilar pembentuk skor kemudahan berusaha di Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 2. Realisasi FDI Menurut Jenis Industri, Tahun 2019-2023 (Juta US\$)



Sumber: BPS, 2024

Skor pilar *regulatory framework*, *public services*, dan *operational efficiency* masih relatif rendah, yakni sebesar 63,98; 63,44; dan 61,31 dari angka maksimal 100. *Regulatory framework* merupakan pilar yang mengukur kualitas regulasi, *public services* mengukur infrastruktur yang disediakan Pemerintah, dan *operational efficiency* mengukur kualitas implementasi regulasi dan layanan publik. Capaian tersebut mengisyaratkan perbaikan terhadap ketiga pilar masih perlu dilakukan Pemerintah guna meningkatkan kemudahan berusaha dan mengoptimalkan FDI di masa mendatang.

Selain tiga pilar tersebut, B-Ready juga menilai 10 aspek lainnya yang meliputi *business entry* (skor 63,72), *business location* (68,09), *utility services* (70,55), *labor* (72,20), *financial services* (56,51), *international trade* (64,58), *taxation* (59,91), *dispute resolution* (64,24), *market competition* (52,34), dan *business insolvency* (56,96). Laporan tersebut menyoroti bahwa dibutuhkan waktu hingga 65 hari untuk menyelesaikan perizinan sedangkan, negara tetangga yang membutuhkan 7-10 hari dalam hal pengurusan perizinan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Alvian et.al (2024) yang menyebutkan kepastian hukum dan kompleksitas regulasi di Indonesia juga masih menjadi penghambat FDI masuk ke Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh Damayanti (2025) bahwa kebijakan terkait dengan investasi asing belum efisien.

Hal yang Harus menjadi Perhatian

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara. Investasi bisa dijadikan sebagai salah satu faktor kunci dalam menggerakkan perekonomian. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa masuknya modal asing ke Indonesia memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak hanya modal yang masuk, namun juga adanya pertukaran teknologi dan inovasi yang memberikan *multiplier effect* ke berbagai aspek. Agar dampaknya FDI optimal memperkuat perekonomian nasional, Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah memetakan industri prioritas yang memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mengarahkan kebijakan dan stimulus pada industri prioritas tersebut. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan tepat guna memperbaiki kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia, khususnya pada aspek *regulatory framework*, *public services*, *operational efficiency*, penyederhanaan birokrasi serta perizinan sebagaimana diungkap laporan B-Ready. Langkah tersebut dibutuhkan agar paradigma akselerasi perekonomian ke depan lebih bertumpu pada membaiknya kinerja aspek fundamental perekonomian dibanding bertumpu pada kebijakan yang bersifat temporer dan jangka pendek.

Daftar Pustaka

- Allen, Dashen. 2024. "FDI and Economic Growth: A case Study of Indonesia with Dynamic Econometric Model". *Tamansiswa Accounting Journal International*. Volume 15 No.1, page 90-110
- Banjaransari, Alfian et al. 2025. "Revolutionizing FDI Policy Towards Equitable Growth in Indonesia". *CME Policy Brief No.5*.
- Bank Indonesia. 2025. "Survei Konsumen Juni 2025: Keyakinan Konsumen Terjaga". Diakses <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Survei-Konsumen-Juni-2025.pdf> pada Tanggal 12 Juli 2025.
- BPS. 2024. "Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi (23 Sektor0 (Juta US\$)". Diakses <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgzOSMy/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-sektor-ekonomi-23-sektor-.html> pada tanggal 17 Juli 2025
- BPS. 2025. "Ekonomi Indonesia Kuartal I-2025 Tumbuh 4,87 persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Kuartal I-2025 Terkontraksi 0,98 Persen (Q-to-Q)." Diakses <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431/ekonomi-indonesia-kuartal-i-2025-tumbuh-4-87-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-kuartal-i-2025-terkontraksi-0-98-persen--q-to-q-.html> pada Tanggal 16 Juli 2025.
- Damayanti, Aulia. 2025. "RI Diharapkan lebih efisien soal Kebijakan Investasi Asing". Diakses <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7872256/ri-diharapkan-lebih-efisien-soal-kebijakan-investasi-asing> pada tanggal 16 Juli 2025.
- Fazaalloh, Al Muizzuddin. 2024. "FDI and Economic Growth in Indonesia: a provincial and sectoral analysis". *Journal of Economic Structure*.
- Hasiana, Dovana. 2025. "Kemenkeu Proyeksi Ekonomi Tumbuh Tak Lebih dari 5% Q2-2025." Di akses <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/77292/kemenkeu-proyeksi-ekonomi-tumbuh-tak-lebih-dari-5-q2-2025> pada Tanggal 16 Juli 2025.
- Kemenkeu RI. 2025. "Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2025". Diakses <https://www.youtube.com/watch?v=IKTy4NU0szw> pada Tanggal 12 Juli 2025.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 2025. " Di Tengah Gejolak Ekonomi Global, Investasi RI Q1-2025 tumbuh 15,9%. Di akses <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/di-tengah-gejolak-ekonomi-global-investasi-ri-q1-2025-tumbuh-15-9> pada Tanggal 10 Juli 2025
- Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. 2025. "Ekonomi Kita Edisi Maret 2025". Diakses <https://drive.google.com/drive/1Mky6WkpumFLuCM4Rz> pada Tanggal 25 Juli 2025.
- Purwanti, Agustina. 2025. "Jajak Pendapat "Kompas": Anggaran Minim Masyarakat untuk Lebaran 2025". Diakses <https://www.kompas.id/artikel/jajak-pendapat-kompas-anggaran-minim-masyarakat-untuk-lebaran-2025> Tanggal 16 Juli 2025.
- Sugiyanto, Rama et al. 2024. "Analysis of Foreign Direct Investment for Economic Growth In Indonesia". *International Conference of Economics, Business, and Entrepreneurship (ICBE) 2024*.
- World Bank. 2024. "Business Ready 2024". Diakses <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/08942fab-9080-4f37-b7bef61c9f9aed9/content> pada tanggal 17 Juli 2025. fu

Tantangan Pengembangan Koperasi Merah Putih

Mutiara Shinta Andini*)

Abstrak

Program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagaimana termaktub dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 merupakan inisiatif strategis Pemerintah Indonesia untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Per Juli 2025, tahap awal dengan target 80.000 KMP sudah dapat direalisasikan. Namun, pencapaian tujuan akhir Inpres Nomor 9 Tahun 2025 masih sangat ditentukan oleh langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan yang berpotensi menghambat keberhasilan program KMP di masa mendatang, mulai dari kelembagaan hingga kolaborasi multi sektor. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah menyusun roadmap pengembangan KMP yang lebih terukur dan komprehensif. Roadmap tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (i) indikator keberhasilan yang lebih terukur; (ii) strategi pengembangan dan keberlanjutan program jangka panjang; dan (iii) strategi penguatan sense of belonging dan kolaborasi multi sektor.

Pada Maret 2025, Presiden RI menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres Nomor 9 Tahun 2025). Terbitnya Inpres tersebut merupakan langkah Pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. Secara implisit, inisiatif dalam Perpres tersebut merupakan bentuk strategi revitalisasi ekonomi desa berbasis kelembagaan komunitas, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan pendirian, pengembangan dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), sebagai bentuk reorientasi model pembangunan desa dari pendekatan infrastruktur menuju penguatan kelembagaan ekonomi akar rumput.

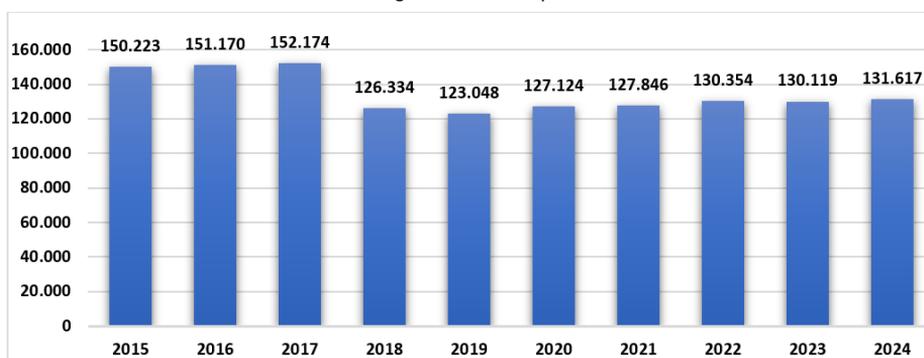
Merujuk pada dokumen KEM-PPKF 2026, desain KMP menjadi salah satu program prioritas yang terdiri atas empat pilar utama: (1) Pembentukan dan revitalisasi koperasi, (2) Penguatan tata kelola dan profesionalisasi, (3) Pendanaan dan insentif fiskal, serta (4) Kolaborasi multi

pihak. Model pembiayaan koperasi merah putih mengadopsi skema blended finance dari APBN, APBD, dana desa, dan sumber lain. Pemerintah memproyeksi total kebutuhan anggaran KMP sebesar Rp400 triliun sebagai modal awal untuk mendirikan 80.000 koperasi, atau sekitar Rp5 miliar per unit. Kebutuhan anggaran tersebut direncanakan bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber sah lainnya seperti CSR dan aset desa.

Berdasarkan data resmi per 14 Juli 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, perkembangan pembentukan KMP menunjukkan capaian dari total 83.762 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, sebanyak 83.685 (99,9 persen) telah tersosialisasi program ini, dan 81.147 di antaranya (sekitar 96,9 persen) telah berhasil membentuk KMP melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. Angka tersebut tidak melampaui target dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Apabila dilihat dari sebarannya, distribusi pembentukan koperasi di tingkat wilayah menunjukkan ketercapaian penuh di Wilayah I, II, dan IV dengan tingkat pembentukan mencapai 100 persen. Sementara Wilayah III telah mencapai 88,23 persen pembentukan koperasi. Berdasarkan data provinsi, sebagian

*) *Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia



Sumber: *DataIndonesia.id*, 2025

besar daerah termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, hingga Kalimantan telah menyelesaikan seluruh proses pembentukan koperasi. Namun, terdapat beberapa daerah tertinggal dalam progres pembentukan, seperti Papua Pegunungan (882 dari 2.627 desa), Papua Tengah (847 dari 1.208 desa), dan Papua Selatan (467 dari 690 desa).

Capaian realisasi per 14 Juli 2025 tersebut menunjukkan tahapan awal menuju tujuan akhir terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 telah selesai dilampai Pemerintah. Namun, ketimpangan capaian Wilayah III dengan wilayah lain perlu mendapat perhatian lebih agar faktor geografis dan sosial tidak menghambat percepatan dan keberhasilan realisasi program di wilayah timur Indonesia. Selain itu, pencapaian tujuan akhir Inpres Nomor 9 Tahun 2025 masih sangat ditentukan oleh langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan yang berpotensi menghambat keberhasilan program KMP di masa mendatang. Artikel ini akan mengulas berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah agar tujuan akhir terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dapat diwujudkan.

Tantangan Kelembagaan, Tata Kelola dan Keberlanjutan Program

Daya serap industri terhadap angkatan Dalam perspektif jangka panjang, aspek kelembagaan, tata kelola dan keberlanjutan harus menjadi hal penting yang menjadi fokus pemerintah di masa

mendatang. Keberhasilan tidak boleh hanya sebatas telah terbentuk KMP berbadan hukum sesuai dengan target, namun penguatan kelembagaan dan tata kelola guna memastikan keberlanjutan juga harus menjadi ukuran keberhasilan. Catatan sejarah program sejenis atau program dengan karakteristik yang cenderung identik dapat dijadikan cerminan agar tujuan akhir pembentukan KMP dapat diwujudkan dan tidak mengulang kegagalan di masa lalu. Sejarah koperasi simpan pinjam pada era PNPM dan stimulus ekonomi 2009–2014 membuktikan bahwa koperasi tanpa penguatan kelembagaan dan tata kelola rentan tidak berlanjut setelah dana stimulus habis. SMERU (2020) mencatat 48 persen koperasi hasil program stimulus ekonomi tidak aktif lima tahun kemudian. Studi ISEI (2022) juga menunjukkan hal yang senada, di mana banyak program sejenis gagal karena lemahnya akuntabilitas dan ketergantungan pada insentif negara.

Selain itu, catatan perkembangan koperasi juga dapat dijadikan cerminan perlunya penguatan kelembagaan dan tata kelola KMP ke depannya. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dalam sembilan tahun terakhir (Gambar 1). Selama periode 2019–2024, pemerintah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang dinilai tidak aktif, tanpa mendapat keberatan dari masyarakat

sebagai anggota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi tersebut memang sudah tidak berfungsi secara operasional.

CORE Indonesia (2025) mengingatkan bahwa pembentukan koperasi dalam skala besar berisiko menjauh dari semangat koperasi akar rumput atau inisiatif komunitas seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, ada potensi risiko koperasi hanya menjadi “papan nama” yang mengedepankan kuantitas, bukan kualitas kelembagaan. Studi terdahulu menunjukkan koperasi yang berdiri karena desakan program bukan sebagai hasil inisiatif komunitas, akan mengakibatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) yang menjadi fondasi penting dari pembentukan koperasi tidak terpenuhi sehingga membuat koperasi sulit bertahan dan berkembang secara mandiri (Lendra & Fitriani, 2021; Suryatama & Ayu, 2019). Selain itu, juga terdapat risiko rawan gagal bayar yang nantinya dapat membebani fiskal akibat pelibatan dana APBN dan pinjaman Himbara, khususnya bagi koperasi yang baru tahap awal pembentukan (Core Indonesia, 2025). Risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi pemerintah apabila penguatan kelembagaan dan tata kelola KMP serta penguatan *sense of belonging* menjadi salah satu agenda utama dan berkelanjutan lima tahun ke depan. Penguatan tersebut dibutuhkan agar keberlanjutan dan pertumbuhan KMP di masa mendatang dapat diwujudkan.

Selain aspek kelembagaan dan tata kelola KMP, posisi dan relasi kelembagaan antara KMP dan BUMDes juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Secara empiris, BUMDes merupakan entitas ekonomi desa yang telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Kehadiran KMP yang juga sebagai entitas ekonomi desa berpotensi menciptakan duplikasi fungsi dan kebingungan sehingga keduanya berpotensi tumpang tindih fungsi, dan dapat menjadi kompetitor di desa dengan sumber daya terbatas. Pengalaman

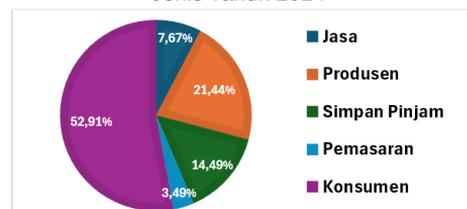
di Kabupaten Blitar dapat menjadi isyarat awal yang perlu dimitigasi. Wacana pembentukan KMP membuat kebingungan di Kabupaten Blitar, karena desa-desa di sana sudah memiliki BUMDes sebagai motor ekonomi tingkat desa sehingga kepala desa melihat potensi tumpang tindih peran antara dua lembaga ini, terutama dalam alokasi dana desa (DesaMerdeka, 2025).

Tantangan kelembagaan yang juga perlu menjadi perhatian Pemerintah yaitu kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola KMP. Tata kelola dan keberlanjutan KMP sangat ditentukan SDM yang memadai. Survei LIPI (2021) menyatakan bahwa 54 persen pengurus koperasi belum pernah mendapat pelatihan manajemen koperasi. Catatan survei LIPI tersebut memberikan isyarat bahwa penguatan SDM KMP juga harus menjadi fokus utama Pemerintah ke depan.

Tantangan Jenis Koperasi Yang Mampu Menciptakan Efek Ganda Yang Optimal

BPS(2023)mencatat70persenkebutuhan pangan desa dipasok dari luar, dan 65 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Di sisi lain, sebaran koperasi menurut jenis di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa koperasi konsumen mendominasi dengan proporsi sebesar 52,91 persen. Angka ini menunjukkan kecenderungan kuat bahwa mayoritas koperasi di Indonesia masih berfokus pada kegiatan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota. Sedangkan koperasi produsen hanya di posisi kedua, yakni 21,44 persen (Gambar 2).

Gambar 2. Komposisi Koperasi Di Indonesia Berdasarkan Jenis Tahun 2024



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2024.

Angka tersebut menunjukkan peran koperasi dalam mendukung sektor produksi belum optimal, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan industri kecil. Padahal, idealnya koperasi harus diarahkan pada jenis koperasi produksi agar mampu memberikan nilai tambah di desa dan sekaligus mampu menciptakan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Oleh karena itu, pengembangan KMP ke depan sebaiknya juga berfokus pada penguatan KMP sebagai koperasi produsen.

Selain itu, pengembangan KMP menjadi koperasi pemasaran juga perlu menjadi fokus pemerintah, mengingat porsi koperasi pemasaran baru 3,49 persen. Pengembangan ini didasarkan pada kebutuhan sinergi antara koperasi produsen dengan koperasi pemasaran yang nantinya akan menjadi penggerak ekonomi produktif dan distribusi nilai tambah secara kolektif di tingkat lokal, sehingga mampu memberikan efek pengganda atau *multiplier effect* yang lebih optimal. Studi IPB (2022) menunjukkan bahwa koperasi produksi memiliki margin laba bersih dua kali lipat dari koperasi konsumsi. Contoh koperasi sukses seperti Koperasi Kopi Gayo, KSU Mitra Tani, dan Mina Bahari membuktikan bahwa koperasi yang fokus pada produksi dan hilirisasi mampu menembus pasar ekspor dan menciptakan lapangan kerja lokal (Anggawira, 2025).

Menuju Gerakan Berkelanjutan

Keberhasilan koperasi salah satunya ditentukan oleh partisipasi warga dan rasa kepemilikan yang kuat, selain aspek kelembagaan dan tata kelola. Model piramida permasalahan menunjukkan bahwa fondasi koperasi ada pada motivasi dan inisiatif masyarakat, bukan hanya regulasi pusat. Studi Farhana & Mintarsih (2022) menekankan bahwa koperasi yang lahir dari inisiatif komunitas lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Oleh karena itu, penguatan partisipasi dan kepemilikan yang kuat atas KMP di masa mendatang merupakan tantangan yang

harus dijawab. Selain itu, pengembangan KMP ke depan juga harus mampu melibatkan dan berkolaborasi berbagai *stakeholders* lainnya agar terkoneksi dengan ekosistem industri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong keterlibatan pengusaha muda dalam memperkuat koperasi desa melalui peran sebagai mentor, pendamping agroindustri digital, dan penghubung ke ekosistem usaha modern (Anggawira; HIPMI, 2025). Upaya lain yang juga harus dilakukan yaitu menjembatani kendala akses pasar ketika KMP difokuskan menjadi koperasi produsen.

Guna mewujudkan hasil akhir Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan mewujudkan keberlanjutan KMP di masa mendatang, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah menyusun *roadmap* pengembangan KMP yang lebih terukur dan komprehensif. *Roadmap* tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (i) indikator keberhasilan yang lebih terukur seperti rasio modal sendiri, volume transaksi, dan kontribusi pendapatan anggota; (ii) strategi pengembangan dan keberlanjutan program jangka panjang, termasuk penguatan kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia; (iii) strategi penguatan *sense of belonging* dan kolaborasi multi sektor, termasuk akses pasar, kemitraan, serta pemanfaatan platform digital.

Daftar Pustaka

Anggawira. (2025, Juli 12–13). Koperasi Merah Putih: Jalan revolusi ekonomi atau sekadar proyek? Investor Daily: Tangerang.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Ketahanan Pangan. BPS.

CORE Indonesia. (2025). Paradoks Gerak: Kajian Awal Koperasi Merah Putih. CORE Indonesia.

DataIndonesia.id. 2025. Data Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia 10 Tahun Terakhir hingga 2024. Diakses dari <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/data-jumlah-koperasi-aktif-di-indonesia->

10-tahun-terakhir-hingga-2024

DesaMerdeka.com. 2025. KopDes MP vs Bumdes: Blitar Bingung, Tumpang Tindih?. Diakses dari <https://desamerdeka.id/kopdes-mp-vs-bumdes-blitar-bingung-tumpang-tindih/>

Farhana, F., & Mintarsih, D. (2022). Daya Tahan Koperasi Berbasis Komunitas. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 18(1), 45–60.

Institut Pertanian Bogor. (2022). Kinerja Koperasi Produksi dan Konsumsi: Studi Perbandingan di Lima Kabupaten. Pusat Kajian Koperasi dan UKM IPB.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. (2022). Efektivitas Blended Finance dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. ISEI.

Kementerian Dalam Negeri & Bappenas. (2025). Evaluasi Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Inpres 9/2025. Laporan Bersama.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Evaluasi Koperasi Aktif Nasional. Kemenkop UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). Laporan Progres Pembentukan Koperasi Merah Putih per Mei 2025. Kemenkop UKM.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2021). Survei Nasional Kapasitas Pengelola Koperasi. LIPI.

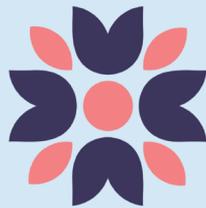
Lendra, A., & Fitriani, R. (2021). Krisis Kepercayaan pada Koperasi Indonesia: Studi Kasus. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 12(2), 112–129.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Cooperatives in the 21st Century: Resilience, Innovation, and Inclusion*. OECD Publishing.

Setneg Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi. Sekretariat Negara.

SMERU Research Institute. (2020). *Evaluasi Keberlanjutan Program Stimulus Ekonomi Berbasis Koperasi*. SMERU.

Suryatama, A., & Ayu, D. N. (2019). Koperasi dan Pemberdayaan Komunitas: Sebuah Evaluasi. *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(1), 23–39.



PA3KN
#Menyala

www.pa3kn.dpr.go.id
Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635
Instagram: @pa3kn.bkdprri
Youtube: PA3KN BK DPR RI

